

REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019-2024: STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

Andrei I. Pandelaki¹
Burhan Niode²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen politik oleh partai politik yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, dan studi dokumentasi. Informan terbagi dalam dua kategori, yaitu informan formal yang dipilih dari pengurus partai dan informan informal yang mewakili masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan dapat menentukan kualitas calon legislatif yang akan diusung. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu proses rekrutmen yang dilakukan partai politik sangat penting bagi partai dan juga masyarakat untuk mengetahui kualitas, pemahaman, prinsip, serta tujuan yang dimiliki seorang calon legislatif.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Legislatif.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Menurut Miriam Budiardjo (2008:408-409) “rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Terdapat berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, maupun cara-cara lain.”. Dengan demikian proses rekrutmen politik merupakan suatu proses yang sangat penting, tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan partai politik itu sendiri, melainkan juga untuk menguji kemampuan yang dimiliki seseorang yang akan dicalonkan sebagai pejabat dalam pemerintahan suatu negara. Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering keberadaannya dan kinerjanya menjadi ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu Negara. Meskipun partai bukan pelaksana dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan. Namun pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik yang selama ini berlangsung masih cenderung tertutup sehingga proses yang berlangsung tidak dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat luas. Hal ini menyebabkan seringkali muncul anggapan-anggapan negatif terhadap proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu partai yang masih sangat baru dalam kanca perpolitikan di Indonesia, sehingga partai dengan pengurus dan simpatisan yang tergolong berusia muda ini dapat menjadi “role model” bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai pemilih yang mayoritas berasal dari kalangan muda,

sehingga proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai ini dirasa penting untuk diketahui apakah partai yang tergolong baru ini juga membawa inovasi baru dalam proses rekrutmen politik yang dilakukannya ataukah hanya menggunakan cara-cara lama seperti halnya partai politik lain yang telah eksis sejak lama.

Tinjauan Pustaka Konsep Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008:397-398) Partai Politik pertama kali lahir di Negara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik yang berlangsung. Pada awal perkembangannya, akhir abad 18-an di Negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mulanya bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.

Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan caucus party). Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.” (Miriam Budiardjo, 2008:398).

Menurut Miriam Budiardjo (2008:403-404) secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger dari buku *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indoneia* (2015:9) menyebutkan bahwa kata Partai berasal dari bahasa latin “pars”, yang berarti “bagian”. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie (*Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, 2015:9) menyebutkan bahwa Partai juga berasal dari bahasa Inggris yaitu “part”, yang berarti bagian atau golongan. Kata Partai merujuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.

Konsep Legislatif

Menurut Miriam Budiardjo (2008:315) Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur

“berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dari namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Berdasarkan teori ini rakyat yang berdaulat mempunyai suatu kehendak (yang oleh Rosseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*) yang mana setiap keputusan yang diambil baik bersifat kebijakan maupun Undang-Undang mengikat seluruh masyarakat.

Selain itu Miriam Budiardjo (2008:317) juga mengemukakan bahwa legislatif merupakan suatu perwakilan, baik perwakilan politik (political representation) maupun perwakilan fungsional (functional representation) yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.

Konsep Rekrutmen

Dikutip dari tesis *Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City* (Stefanus Sampe, 2015:46) ‘partai politik bertindak sebagai media dalam rekrutmen politik’, menurut Smith (2009:109) ‘partai politik di negara berkembang berfungsi sebagai mekanisme utama untuk merekrut dan mempersiapkan orang untuk mengejar karir politik. Untuk melakukan ini, partai politik biasanya mencoba

menarik orang untuk menjadi anggota. Dari anggota ini mereka mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin partai, dan mempersiapkan mereka untuk bertarung dalam pemilihan umum dan menduduki jabatan publik. Namun, kegiatan rekrutmen ini dapat dilakukan secara berbeda oleh partai politik tergantung pada karakteristik dan konteks partai.'

Kegiatan rekrutmen partai politik yang paling dasar adalah untuk memperoleh anggota. Partai-partai politik mengadopsi berbagai strategi seperti membuka pendaftaran kepada sebanyak mungkin anggota, atau membebaskan biaya untuk keanggotaan yang membawa kartu. (Stefanus Sampe, 2015:46)

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh Partai Politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni :

1. Penjaringan Calon, dimana dalam tahap ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Cara mendapatkan informasi melalui pengamatan juga dirasa akan lebih efektif, karena data yang didapatkan berdasarkan fakta dilapangan.

Menurut Moleong (2011:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsep khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini penulis telah menentukan informan penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang. Yang terbagi menjadi 7 (tujuh) orang sebagai informan formal yang berasal dari internal partai politik dan 3 (tiga) orang sebagai informan informal yang berasal dari masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil yang peneliti dapatkan dari proses penelitian yang berlangsung di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:8) Partai Solidaritas Indonesia juga memiliki tiga tahapan utama dalam melakukan rekrutmen, yaitu proses penjaringan, proses seleksi, dan proses penetapan.

Dalam proses penjaringan, selain menjaring orang-orang dari luar partai, Partai Solidaritas Indonesia juga memprioritaskan kader partai untuk mengikuti proses dalam penentuan calon legislatif, hal ini dikarenakan partai ini masih merupakan partai baru, sehingga keikutsertaan kader partai dalam pemilihan umum yang berlangsung dirasa sangat penting dan harus di prioritaskan. Karena PSI sendiri belum memiliki kader partai yang cukup dikenal masyarakat secara luas, dan juga PSI tidak memiliki kader yang berpengaruh dalam politik dengan demikian prioritas kader partai untuk maju dalam pemilihan umum juga dimaksudkan untuk mengangkat tingkat elektabilitas kader partai.

Dalam proses penjaringan, Partai Solidaritas Indonesia menggunakan cara sosialisasi kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui acara "Kopdar" disini PSI memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap kegiatan politik, khususnya masyarakat dan kader partai yang ingin bertarung dalam kegiatan pemilihan umum.

Pendidikan politik ini dilakukan juga untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat yang ingin bertarung dalam pemilihan umum melalui Partai Solidaritas Indonesia, agar memiliki pandangan yang sejalan dengan partai.

Partai Solidaritas Indonesia sendiri memiliki niat untuk merangkul setiap elemen masyarakat, namun dalam acara pendidikan politik yang dilakukan PSI ini memiliki penargetan orang-orang yang berada dalam rentan usia tertentu, sehingga tidak memiliki cakupan yang cukup luas, yang membuat PSI tidak benar-benar

memenuhi niatannya untuk merangkul setiap elemen masyarakat secara maksimal.

Dalam proses selanjutnya, yaitu tahapan seleksi Partai Solidaritas Indonesia memiliki cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan menghadirkan tim independen yang bertugas untuk melakukan penjurian. Para juri independen memiliki hak prerogatif dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan, sehingga tidak dapat di intervensi oleh siapapun, hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif, dengan demikian orang-orang yang terpilih adalah orang yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai seorang calon anggota legislatif.

Dalam proses terakhir, yaitu tahap penetapan calon anggota legislatif juga dilakukan secara terbuka dan seadil mungkin, dalam tahapan ini penentuan nomor urut calon anggota legislatif dilakukan dengan cara pengundian nomor, cara ini memungkinkan setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan nomor urut berapapun secara acak.

Kemudian saat peneliti menanyakan pandangan Partai Solidaritas Indonesia mengenai gaya rekrutmen partai politik lain melalui sekretaris umum DPW PSI Provinsi Sulawesi Utara, beranggapan bahwa setiap partai politik memiliki caranya masing-masing, dan cara yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dimaksudkan sebagai pembandingan, agar masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas terhadap rekrutmen yang dilakukan partai politik, bahwa ada partai politik yang menggunakan cara-cara yang berbeda.

Dalam menggunakan cara-cara baru ini, Partai Solidaritas Indonesia

sendiri juga mengalami beberapa masalah, salah satunya yaitu mendapatkan respon yang kurang baik dari sebagian masyarakat.

Selain itu dalam menanggapi proses rekrutmen yang selama ini berlangsung, beberapa kelompok masyarakat mengaku telah mengetahui mengenai kegiatan rekrutmen, namun tidak mengetahui secara jelas setiap proses tahapan dari kegiatan rekrutmen ini.

Kesimpulan

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin di tinggalkan oleh partai politik. Meskipun demikian, masih terdapat banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang masih sangat baru dalam konstelasi politik di Indonesia, sehingga rekrutmen politik dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki beberapa kecenderungan yang membuat partai baru ini menonjol di kalangan masyarakat luas, yaitu Partai Solidaritas Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai positif dalam membangun citranya terhadap masyarakat sebagai partai baru dalam berpolitik. Seperti nilai anti-intoleransi, anti-korupsi, dan berbagai hal positif lainnya. Dengan demikian Partai Solidaritas Indonesia menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar yang paling utama dalam melakukan rekrutmen politik.

Selain itu Partai Solidaritas Indonesia memiliki tujuan atau keinginan untuk merangkul setiap elemen masyarakat, khususnya anak muda dan keterwakilan perempuan.

Stigma partai politik yang kurang baik di sebagian kalangan masyarakat membuat partai ini ingin melakukan suatu perubahan pola pikir, dan hal ini diwujudkan melalui kader-kader, pejabat daerah, maupun calon-calon legislatif muda yang akan menjadi “bibit” baru dalam dunia politik Indonesia.

Hal ini dimulai dari pemberian materi dalam ruang-ruang publik, pemberian materi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat, salah satu contoh, kegiatan ini dilakukan melalui acara “Kopdar” atau Kopi Darat, dimana kegiatan diskusi santai ini sengaja dilakukan secara semi-formal atau dalam situasi yang lebih santai sehingga dapat menarik perhatian anak muda, serta membuat peserta yang sebagian besar adalah anak muda menjadi lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Memiliki keinginan untuk merangkul setiap lapisan masyarakat untuk dapat bergabung dalam kegiatan politik yang berlangsung, tidak hanya orang-orang yang memiliki ikatan atau hubungan dengan elit partai, tetapi siapapun yang memiliki kualifikasi yang baik, orang-orang yang masih memiliki idelisme, memiliki sifat kritis serta keinginan yang kuat, dengan dasar inilah Partai Solidaritas Indonesia melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan sehingga dapat mencakup setiap lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang, namun tetap memiliki kriteria-keritaria atau persyaratan yang menentukan apakah orang tersebut memiliki kapabilitas atau kualifikasi yang cukup untuk di calonkan.

Saran

1. Partai Solidaritas Indonesia telah mengikuti aturan-aturan yang di atur dalam Undang-undang mengenai tata cara berpolitik serta melakukan rekrutmen politik. Namun, Partai Solidaritas Indonesia tidak mampu memperoleh suara yang cukup untuk menembus "Parliament Threshold", berdasarkan fakta yang peneliti dapat di lapangan, faktor utama yang membuat PSI tidak mampu menembus parlemen, yaitu tokoh-tokoh partai yang dimiliki PSI belum populer atau dengan kata lain belum memiliki pengaruh, selain itu identitas partai yang masih cenderung lemah sehingga tidak mampu mengangkat elektabilitas partai secara maksimal. Dengan demikian proses mempromosikan baik identitas partai secara keseluruhan, maupun identitas para tokoh secara khusus kepada publik wajib menjadi agenda utama PSI, hal ini setidaknya dapat memberikan alasan bagi masyarakat untuk memasukan PSI dalam pertimbangan dalam pemilihan umum dikemudian hari.

2. Selain melakukan rekrutmen secara terbuka untuk menentukan calon-calon legislatif yang akan bertarung dalam kegiatan politik, Partai Solidaritas Indonesia juga harus memastikan bahwa setiap calon yang terpilih tetap memiliki idealisme dan sifat-sifat anti-korupsi, serta tetap konsisten dengan tujuan awal untuk memperjuangkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

3. Partai Solidaritas Indonesia memiliki kegiatan pendidikan politik dalam melakukan rekrutmen calon legislatif, akan lebih baik kegiatan seperti ini tidak terhenti ketika proses rekrutmen calon anggota legislatif berakhir, namun kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat terus dilanjutkan, baik dalam

kegiatan formal, maupun kegiatan-kegiatan non-formal.

4. Partai Solidaritas Indonesia memiliki target utama anak muda dalam melakukan penjangkaran anggota, maka dari itu melalui kader-kader di daerah ada baiknya PSI melebarkan cakupannya dalam melakukan pendidikan politik. Tidak hanya anak muda yang memenuhi kualifikasi usia saja, tetapi dapat memberikan pendidikan politik lebih awal terhadap anak-anak usia sekolah melalui berbagai kegiatan non-formal, sehingga dapat memunculkan keinginan dan semangat sejak dini serta memunculkan rasa ketertarikan terhadap dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanafie, H dan Azmy, A.S. 2018. *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. 2018. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung, Fokusmedia.
- Kimbal, A dan Goraph, F.A. 2017. *Marketing Politik Lokal Teori Dan Analisis Strategi Politik*. Yogyakarta, Alinea Bara.
- Labolo, M dan Ilham, T. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sampe, S. 2015. *Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City*.
- Syafiie, I.K dan Azhari, 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama.

- Syafiie, I.K. 2014. *Proses Legislatif*. Jakarta, PT Refika Aditama.
- Tim Viva Justicia, 2017. *Undang-Undang Pemilu 2019*. Yogyakarta, Genesis Learning.
- Zaman, R.K. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta, PT Mizan Publika.
- Sumber-sumberLain :
- Athlon, E. 2019. *Keluarga Kepala Daerah Mulus Masuk DPRD SULUT*.
www.manadopedia.com/2019/05/11/keluarga-kepala-daerah-mulus-masuk-dprd-sulut/
- Hadi, U. 2018. *Anak Amien Ramai-Ramai Nyaleg, Politisi PDIP: Nepotisme Baru*.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4250769/anak-amien-ramai-ramai-nyaleg-politisi-pdip-nepotisme-baru>
- Harera, M.M. 2013. *Pengamat: Sistem Rekrutmen Parpol Harus Di Perbaiki*.
<https://merdeka.com/amp/politik/pengamat-sistem-rekrutmen-parpol-harus-diperbaiki.html>
- Marbun, J.2014. *Nepotisme Dinilai BelumPunah*.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/06/n55tds-nepotisme-dinilai-belumpunah>
- Manroe, M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, dan Jenisnya*.
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html>
- Manroe, M. 2019. *Pengertian Wawancara Secara Umum Tujuan, Jenis, Dan Ciri-Ciri Pewawancara*.
<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html>
- Nugroho, A.S. 2018. *Artis Dinilai Masih Kurang Mumpuni Jadi Caleg*
<https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/12/pdcotv428-artis-dinilai-masih-kurang-mumpuni-jadi-caleg>
- Fitriya. 2019. *Pengertian Nepotisme: Apa Itu Nepotisme?*
<https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-nepotisme-apa-itu-nepotisme.html>